



PELUANG USAHA DALAM TAHUN 2011: TINJAUAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) TAHUN 2011

Soegeng Wahyoedi

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Krida Wacana

Email: swahyoedi@ukrida.ac.id

Abstract: *As a fiscal instrument, Government Budget 2011 (APBN 2011) has a strategic role in creating opportunities for businesses. Budget 2011 was awaited by the businesses as a reference for their businesses in 2011. Assumptions underlying the 2011 budget were reasonably realistic so that the impact of the figures of the budget can be analyzed. From the revenue side, there are no new levies that burden the business world, while from the expenditure side, in the form of central government expenditures, there are 10 sectors which have allocation more than Rp 10 trillion and 26 sectors having more than Rp 1 trillion. Business opportunities are also created in the forms of expenditure in the form of transfers to the regions.*

Keywords: *Government Budget, Business Opportunities, State Expenditures, State Revenue*

PENDAHULUAN

Setelah melalui pembahasan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2011 diundangkan pada tanggal 19 Nopember 2010 melalui Undang-undang Nomor 10 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pendapatan negara akan berjumlah sebesar Rp 1.104.901.964,2 juta dan belanja negara akan sebesar Rp 1.229.558.465,3 juta, sehingga APBN tahun 2011 akan mengalami defisit sebesar Rp 124.656.501,1 juta.

Sebagai perangkat fiskal, APBN ditunggu oleh pelaku ekonomi khususnya dunia usaha, terkait dengan seberapa besar peluang usaha yang diciptakan oleh APBN 2011. Di samping itu, melalui arah kebijakan APBN 2011 akan dapat dilihat sektor-sektor mana yang akan mendapat alokasi anggaran terbesar dari pemerintah sehingga terbuka peluang bagi dunia usaha pada sektor tersebut. Dengan kata lain APBN 2011 ditunggu oleh dunia usaha karena akan menjadi referensi dalam menyiapkan rencana kerja dan rencana anggaran perusahaan.

APBN 2011 disusun dalam bayang-bayang krisis ekonomi yang melanda kawasan Eropa khususnya Portugal, Itali, Yunani dan Spanyol, setelah beberapa tahun sebelumnya krisis *mortgage sub prime* melanda Amerika Serikat. Sementara itu masalah klasik perekonomian Indonesia masih tidak jauh bergeser dari pengangguran yang tahun 2010 mencapai sekitar 9 juta orang (BPS: 2010) dan kemiskinan yang masih berada dalam kisaran 31 juta orang (BPS:2010). Tulisan ini hendak menelaah seberapa besar peluang usaha yang tercipta dalam APBN 2011.

Asumsi yang mendasari APBN 2011

APBN 2011 disusun Pemerintah bersama-sama dengan DPR melalui kesepakatan awal atas asumsi-asumsi ekonomi makro yang disepakati sebagai berikut:

TABEL 1: ASUMSI VARIABEL EKONOMI MAKRO APBN 2011

Variabel	Besaran
Pertumbuhan Ekonomi	6,4%
Nilai Tukar Rp/US\$	9.250
Inflasi	5,3%
Suku Bunga SBI	6,5%
Harga Minyak Mentah (US\$/barrel)	80,0
Lifting Minyak Mentah (barrel per hari)	970.000

Sumber: Kementerian Keuangan



Di samping indikator ekonomi makro di atas, APBN 2011 diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan hingga berada pada kisaran 11,5% - 12,5%. APBN 2011 juga di asumsikan bahwa setiap 1% pertumbuhan ekonomi akan mampu menyerap 400.000 tenaga kerja.

Agar dapat dilakukan analisis yang mendalam menyangkut besaran-besaran dalam APBN 2011, maka terlebih dahulu perlu diperiksa kesahihan dari asumsi-asumsi yang digunakan untuk menyusun APBN 2011. Penyusunan asumsi yang kurang tepat akan berdampak kepada nilai besaran yang kurang tepat pula. Asumsi pertama adalah Pertumbuhan Ekonomi tahun 2011 yang diperkirakan akan sebesar 6,4%. Kinerja dari perekonomian Indonesia yang diukur dengan besarnya pertumbuhan ekonomi, pada beberapa tahun belakangan cukup baik. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010 berturut-turut sebesar 6,3%, 6,0%, 4,6% dan 6,1%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu menahan laju krisis ekonomi sebagai akibat krisis dari Amerika Serikat maupun Eropa. Sementara itu beberapa lembaga ekonomi dunia seperti Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2011 sekitar 6,1%. Dari perkembangan pertumbuhan ekonomi dunia dan juga pencapaian kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia, maka asumsi pertumbuhan ekonomi yang direncanakan sebesar 6,4% pada tahun 2011 adalah realistis.

Selanjutnya asumsi nilai tukar yang pada tahun 2011 diperkirakan sebesar Rp 9.250 per US\$. Perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika dalam tahun 2010 menunjukkan kecenderungan yang stabil. Rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat menguat dan stabil berada dalam kisaran Rp 9.172/US\$ - Rp 9.200/US\$ (Bank Indonesia) pada tahun 2010, maka proyeksi nilai tukar Rupiah terhadap US dollar yang diperkirakan sebesar Rp 9.250 per US\$ adalah cukup realistis. Sementara itu laju inflasi dalam tahun 2011 diproyeksikan akan sebesar 5,3%. Stabilitas harga-harga umum dalam beberapa tahun belakangan ini cukup terjaga. BPS mencatat besarnya laju inflasi adalah 11,06 (tahun 2008), 2,78 (tahun 2009), dan 6,96 (tahun 2010). Melihat harga-harga yang stabil dalam dua tahun belakangan ini (tahun 2009 dan tahun 2010) dengan laju inflasi yang di bawah 10% (single digit), maka laju inflasi yang pada tahun 2011 diperkirakan akan sebesar 5,3% adalah realistis.

Sementara itu tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dalam tahun 2011 direncanakan sebesar 6,5%. Tingkat suku bunga SBI dalam tahun 2010 berada dalam kisaran antara 6,2% - 6,8% (Bank Indonesia). Sedangkan dalam periode yang sama harga-harga juga stabil dalam laju inflasi sebesar 6,96%. Berdasarkan kinerja suku bunga SBI dan juga laju inflasi pada tahun 2010 ini maka perkiraan besaran suku bunga SBI tahun 2011 cukup realistis.

Sedangkan harga minyak mentah yang dalam APBN tahun 2011 diperkirakan sebesar US\$ 80 per barel juga cukup realistis. Hal ini dikarenakan melihat kinerja dari harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price Oil) selama tahun 2010 yang secara rata-rata mencapai US\$ 79,40 per barel tidak jauh dari yang direncanakan dalam APBN 2011 sebesar US\$ 80 per barrel (Kementerian ESDM, 2011).

Dengan melihat asumsi-asumsi APBN 2011 yang cukup realistis, maka besaran-besaran dalam angka APBN 2011 adalah layak untuk dianalisa. Besaran APBN secara ringkas dapat dilihat pada Pasal 2 ayat 5 Undang-undang nomor 10 tahun 2010 tentang APBN 2011 yang menyebutkan bahwa besarnya anggaran pendapatan negara dan hibah tahun 2011 direncanakan sebesar Rp 1.104,9 triliun. Sedangkan pasal 5 ayat 4 pada undang-undang yang sama menyebutkan bahwa anggaran belanja negara diperkirakan sebesar Rp 1.229,6 triliun. Dengan demikian dalam tahun anggaran 2011 akan terjadi defisit anggaran sebesar Rp 124,7 triliun. Ringkasan APBN 2011 dapat dilihat dalam table di bawah ini.

**TABEL 2: RINGKASAN APBN 2011
(DALAM TRILIUN RUPIAH)**

Pendapatan Negara	Rp 1.104,9
- Pen. Perpajakan	Rp 850,3
- Pen. Bukan Pajak	Rp 250,9
- Hibah	Rp 3,7
Belanja Negara	Rp 1.229,6
- Belanja Pem. Pusat	Rp 836,6
- Transfer ke Daerah	Rp 393,0
Pembiayaan	Rp 124,7
- Dalam Negeri	Rp 125,3
- Luar Negeri	(Rp 0,6)

Sumber: Undang-undang Nomor 10 tahun 2010



Dampak APBN 2011 Bagi Dunia Usaha

Dalam rangka mempengaruhi jalannya ekonomi pemerintah perlu campur tangan ekonomi. Gwartney, Stroup, dan Sobel (2000) mengatakan campur tangan tersebut dalam bentuk kebijakan fiskal (fiscal policy) dan kebijakan moneter (monetary policy). Kebijakan fiskal adalah penggunaan pajak dan kebijakan pengeluaran pemerintah dalam rangka mencapai tujuan ekonomi makro. Sedangkan kebijakan moneter adalah terkait dengan pengaturan jumlah uang beredar. Kebijakan fiskal mempunyai 3 fungsi yakni.

1. Fungsi Alokasi. Fungsi ini terkait dengan fungsi penyediaan barang publik atau proses alokasi dari sumber daya untuk penyediaan barang publik.
2. Fungsi Distribusi. Fungsi ini terkait dengan distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin tercapainya pemerataan pendapatan yang berkeadilan.
3. Fungsi Stabilisasi. Yaitu menjaga stabilitas harga-harga termasuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja, stabilitas ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu Presiden dalam Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2011 beserta Nota Keuangannya menyampaikan 10 sasaran strategis dalam APBN 2011 yakni:

- 1) Ekonomi nasional tumbuh makin tinggi;
- 2) Pengangguran makin menurun dengan menciptakan lapangan kerja yang lebih baik;
- 3) Kemiskinan makin menurun;
- 4) Pendapatan perkapita makin meningkat;
- 5) Stabilitas ekonomi makin terjaga;
- 6) Pembiayaan dalam negeri makin kuat dan meningkat;
- 7) Ketahanan pangan dan air makin meningkat;
- 8) Ketahanan energy makin meningkat;
- 9) Daya saing ekonomi nasional makin menguat dan meningkat;
- 10) Upaya pembangunan yang ramah lingkungan dengan pendekatan "ramah lingkungan" makin kita perkuat

Kebijakan fiskal yang tertuang dalam besaran-besaran angka dalam APBN berdampak kepada dunia usaha. Dampak tersebut pertama-tama dilihat dari sifat kebijakan fiskal apakah kontraksi atau ekspansi. Kebijakan kontraksi adalah kebijakan yang bertujuan untuk mempersempit kegiatan ekonomi, sedangkan kebijakan ekspansi adalah kebijakan yang ditujukan untuk memperluas kegiatan ekonomi. Sifat kontraksi atau ekspansi dari kebijakan fiskal ditunjukkan oleh seberapa besar pendapatan Negara mampu membiayai pengeluaran Negara. Dengan kata lain APBN yang kontraktif berkaitan dengan kebijakan APBN yang surplus yakni pengeluaran negara lebih kecil dari pendapatan negara, dan sebaliknya APBN yang ekspansif adalah terkait dengan kebijakan anggaran yang defisit yakni pengeluaran negara lebih besar dari pendapatan negara (Blanchard, 2009:116).

Dalam kondisi perekonomian yang lesu, pengeluaran pemerintah yang bersifat ekspansif, khususnya belanja barang dan jasa serta belanja modal, dapat memberi stimulasi kepada pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya dalam kondisi ekonomi yang memanas akibat terlalu tingginya permintaan agregat, kebijakan fiskal yang kontraktif dapat berperan untuk menyeimbangkan kondisi permintaan dan penyediaan sumber-sumber perekonomian (RAPBN dan NK 2011). Dornbusch, Fischer, dan Startz (2004) menyatakan bahwa pemerintah dapat mempengaruhi secara langsung kegiatan ekonomi melalui dua cara yakni pertama melalui pajak dan pembayaran transfer, serta kedua melalui pembelian barang dan jasa. APBN 2011 adalah APBN yang ekspansif karena mengalami deficit sebesar Rp 124,7 triliun.

APBN 2011 berpengaruh pada dunia usaha melalui dua sisi, baik pada sisi pendapatan negara dan hibah maupun sisi pengeluaran negara. Pendapatan negara dan hibah terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dana penerimaan hibah. Dalam APBN 2011 pendapatan negara dan hibah adalah sebesar Rp 1.104.902,0 miliar yang terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp 850.255,5 miliar, penerimaan bukan pajak sebesar Rp 250.907,0 miliar dan penerimaan hibah sebesar 3.739,5 miliar.

Dampak pendapatan negara dan hibah bagi dunia usaha adalah melihat apakah dalam meningkatkan penerimaan negara, pemerintah membebani dunia usaha dengan pungutan-pungutan baru baik berupa pajak maupun non pajak. Dalam buku Nota Keuangan dan RAPBN 2011 disebutkan bahwa untuk mencapai target perpajakan dalam tahun 2011, Pemerintah akan tetap melanjutkan upaya perbaikan administrasi perpajakan, melanjutkan program reformasi perpajakan dan melakukan berbagai upaya tambahan (*extra*



effort). Dalam rangka perbaikan administrasi perpajakan, dilakukan pula bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor perkotaan dan pedesaan menjadi pajak daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Dari kebijakan-kebijakan dibidang pendapatan negara yang akan diambil dalam APBN 2011 terlihat bahwa kebijakan perpajakan lebih diarahkan kepada usaha intensifikasi pajak bukan ekstensifikasi pajak. Dengan kata lain pemerintah akan mengintensifkan sumber-sumber pendapatan negara yang sudah ada, tidak menciptakan obyek pajak baru yang akan dibebankan oleh Pemerintah kepada dunia usaha.

Sedangkan dampak APBN 2011 bagi dunia usaha melalui belanja negara adalah dengan melihat bagaimana pemerintah mengalokasikan belanja negara dalam APBN 2011. Belanja negara mempunyai efek pengganda (multiplier) dalam meningkatkan kegiatan ekonomi seperti dijelaskan oleh Dornbuch, Fischer, dan Staz (2004:228) dengan persamaan sebagai berikut:

$$\Delta Y_o = \Delta G / [1 - c(1 - t)]$$

Dimana ΔY_o adalah perubahan pendapatan nasional ΔG adalah perubahan pengeluaran negara, c adalah marginal propensity to consume (MPC) serta t adalah tingkat pajak karena nilai c dan t adalah lebih kecil dari 1, maka setiap kenaikan Rp 1 pada belanja negara (ΔG) akan memberikan pertambahan pendapatan nasional yang berlipat ganda.

Belanja negara atau pengeluaran pemerintah terbagi atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat dikelompokkan dalam belanja pemerintah pusat menurut organisasi, menurut fungsi dan belanja pemerintah menurut jenis. Belanja pemerintah menurut organisasi adalah belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga, sesuai dengan program-program rencana kerja pemerintah yang akan dijalankan. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.

Sementara itu belanja pemerintah pusat menurut jenis adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga hutang, subsidi, belanja hibah, bantuan social dan belanja lain-lain. Belanja pegawai adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja barang adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa, baik yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat, serta belanja perjalanan. Sedangkan belanja modal adalah belanja pemerintah pusat yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.

Besarnya belanja pemerintah pusat adalah sebesar Rp 836.578,2 miliar atau sekitar 70% dari total belanja negara. Belanja pemerintah pusat ini dikelompokkan menurut organisasi, menurut fungsi, maupun menurut jenis. Menurut pasal 6 ayat 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2010 tentang APBN 2011, rincian lebih lanjut dari anggaran belanja pemerintah dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.

Namun demikian dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2011 dijelaskan bahwa belanja pemerintah pusat menurut organisasi yakni menurut kementerian/lembaga, terdapat 11 kementerian/lembaga yang memperoleh pagu di atas Rp 10 triliun yakni:

1. Kementerian Pekerjaan Umum
2. Kementerian Pendidikan Nasional
3. Kementerian Pertahanan
4. Kementerian Agama
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia
6. Kementerian Kesehatan
7. Kementerian Perhubungan



8. Kementerian Pertanian
9. Kementerian Keuangan
10. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
11. Kementerian dalam Negeri

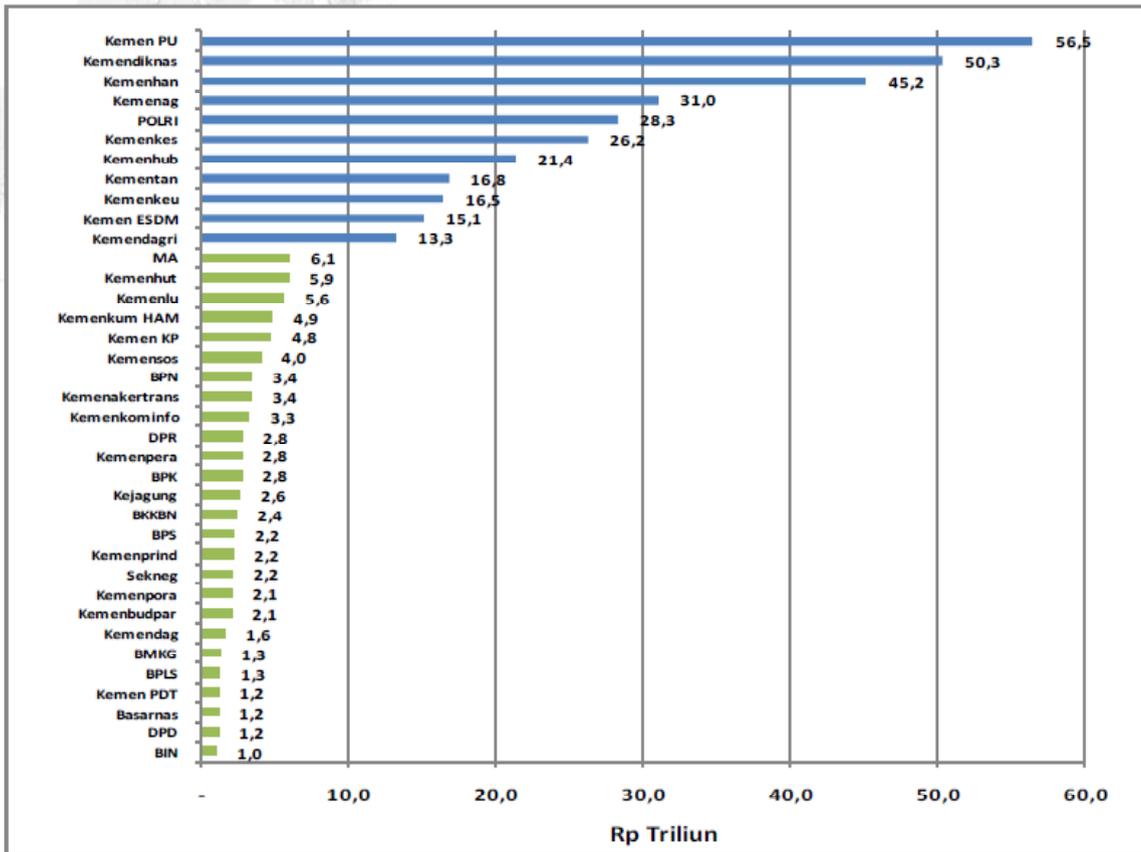
Adapun penggunaan pagu anggaran yang di atas Rp 10 triliun diantaranya akan dilakokasikan untuk:

1. Anggaran belanja Kementerian Pekerjaan Umum dalam tahun 2011 akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program antara lain: (1) program penyelenggaraan jalan, (2) program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman, serta (3) program pengelolaan sumber daya air.
2. Sementara itu balokasi anggaran pada Kementerian Pendidikan Nasional dalam tahun 2011 akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program pendidikan taman kanak-kanak dan pendidikan dasar; (2) program pendidikan tinggi, (3) program peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Sedangkan alokasi anggaran Kementerian Pertahanan dalam tahun 2011 t akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain untuk: (1) program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra darat, (2) program penyelenggaraan manajemen dan operasional matra laut; serta (3) program modernisasi alutsista dan non alutsista serta pengembangan fasilitas dan sarpras matra udara.
4. Alokasi anggaran belanja Kementerian Agama dalam RAPBN tahun 2011 tersebut, akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, diantaranya yaitu: (1) program pendidikan islam; (2) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Agama; serta (3) program bimbingan masyarakat Islam.
5. Sedangkan alokasi anggaran Polri dalam tahun 2011 akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, diantaranya (1) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri; (2) program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; serta (3) program peningkatan sarana dan prasarana aparat Polri.
6. Rencana alokasi anggaran belanja Kementerian Kesehatan dalam RAPBN tahun 2011 akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program pembinaan upaya kesehatan; (2) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Kesehatan; serta (3) program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak.
7. Alokasi anggaran pada Kementerian Perhubungan dalam tahun 2011 akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, diantaranya (1) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut; (2) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara, serta (3) program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretaapian.
8. Kementerian Pertanian dalam tahun 2011 akan memanfaatkan anggaran untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian; (2) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Pertanian; serta (3) program pencapaian swasembada daging sapi dan peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal.
9. Alokasi anggaran pada Kementerian Keuangan dalam tahun 2011 akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Keuangan; (2) program peningkatan dan pengamanan penerimaan pajak; serta (3) program pengawasan, pelayanan, dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai.
10. Alokasi anggaran pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam tahun 2011 akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program pengelolaan listrik dan pemanfaatan energi, dengan alokasi anggaran; (2) program pendidikan dan pelatihan aparat ESDM; (3) program penelitian dan pengembangan Kementerian ESDM; dan (4) program pengelolaan dan penyediaan minyak dan gas bumi.
11. Sedangkan alokasi anggaran pada Kementerian Dalam Negeri akan dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, antara lain: (1) program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; (2) program penataan administrasi kependudukan; serta (3) program peningkatan sarana dan prasarana aparat Kementerian Dalam Negeri.

Ke sebelas sektor ini yang akan memberikan peluang yang menjanjikan bagi dunia usaha yang mempunyai bidang usaha selaras atau berdekatan dengan kesebelas sektor tersebut.

Disamping ke 11 kementerian/lembaga yang memperoleh alokasi anggaran di atas Rp 10 triliun, terdapat 26 kementerian/lembaga yang memperoleh pagu anggaran di bawah Rp 10 triliun namun di atas Rp 1 triliun. Alokasi anggaran menurut Kementerian/Lembaga dengan alokasi anggaran di atas Rp 1 triliun dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 1. Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dengan pagu di atas Rp 1 triliun



Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN 2011

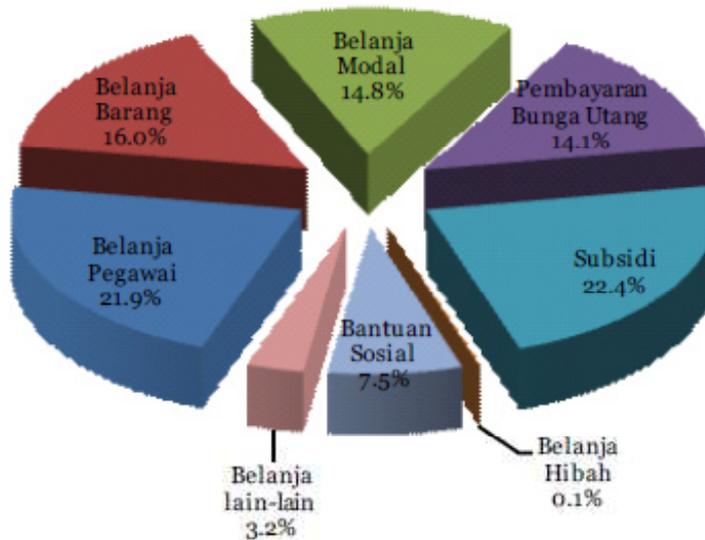
Sementara itu alokasi anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi merupakan pengelompokan belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi-fungsi utama pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai subfungsi, yang pada dasarnya merupakan kompilasi dari anggaran berbagai kegiatan di setiap kementerian negara/lembaga. Dalam APBN tahun 2011, alokasi belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi masih didominasi oleh fungsi pelayanan umum, yang kemudian diikuti secara berturut-turut oleh fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi pertahanan, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi kesehatan, dan fungsi-fungsi lainnya, seperti fungsi lingkungan hidup, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama dan fungsi perlindungan sosial.

Dalam APBN tahun 2011, alokasi belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi masih didominasi oleh fungsi pelayanan umum, yang kemudian diikuti secara berturut-turut oleh fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi pertahanan, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi kesehatan, dan fungsi-fungsi lainnya, seperti fungsi lingkungan hidup, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama dan fungsi perlindungan sosial. Relatif tingginya porsi alokasi anggaran pada fungsi pelayanan umum tersebut menunjukkan bahwa fungsi pemberian pelayanan umum kepada masyarakat merupakan fungsi utama pemerintah.

Sedangkan belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja secara persentase adalah sebagai berikut: Subsidi (22,4%), belanja pegawai (21,9%), belanja barang (16,0%), belanja modal (14,8%), pembayaran bunga utang (14,1%), belanja social (7,5%), belanja lain-lain (3,2%) dan belanja hibah (0,1%). Sebaran

belanja pemerintah menurut jenis belanja dapat dilihat dalam diagram di bawah ini.

KOMPOSISI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS BELANJA, TAHUN 2011



Sumber: Kementerian Keuangan

Alokasi anggaran belanja pegawai dipergunakan antara lain untuk (1) kebijakan meningkatkan gaji pokok bagi PNS dan anggota TNI/POLRI dan pensiunan sebesar rata-rata 10 persen, yang bertujuan selain untuk meningkatkan; (2) melanjutkan kebijakan pemberian gaji bulan ke-13, serta (3) menampung cadangan alokasi anggaran untuk mengantisipasi kebutuhan gaji bagi tambahan pegawai baru di instansi pemerintah pusat. Sementara itu alokasi anggaran pada pos belanja barang, terutama diarahkan untuk: (1) menjaga kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pemeliharaan aset, termasuk penyediaan belanja operasional bagi satuan kerja baru; dan (2) menyediakan dana untuk biaya perjalanan dalam rangka mendukung tugas pokok.

Belanja modal dalam APBN merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, dan bukan untuk dijual. Dengan sifat atau karakteristik tersebut, maka belanja modal diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, secara berkesinambungan melalui pembangunan sarana-prasarana dan berbagai kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Sasaran umum pembangunan infrastruktur dalam tahun 2011 antara lain adalah: (1) mendukung ketahanan pangan nasional; (2) meningkatkan keterhubungan antarwilayah; (3) memperkuat *virtual domestic interconnectivity/ Indonesia connected*; (4) mengurangi *back log* perumahan; (5) meningkatkan ketahanan energi nasional; dan (6) menjaga ketersediaan air baku dan pengendalian banjir.

Dalam kaitan ini, belanja modal akan digunakan untuk mendukung program-program yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga, antara lain: (1) penyediaan pembangunan infrastruktur dasar (jalan, jembatan, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik) untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan rakyat; (2) penyediaan pembangunan infrastruktur pertanian (irigasi, optimalisasi/ konservasi/reklamasi lahan, dan pengembangan agrobisnis) untuk mendukung pencapaian program ketahanan pangan; (3) pengembangan infrastruktur dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam; (4) prioritas diberikan untuk pendanaan kegiatan *multiyears* guna mendukung kesinambungan pembiayaan; serta (5) peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap dampak negatif akibat perubahan iklim.

Dengan demikian peluang usaha yang tercipta dari APBN 2011 bagi dunia usaha sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari besarnya anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 2010 yang direncanakan sebesar Rp 836.578.166.827.800,00



(delapan ratus tiga puluh enam triliun lima ratus tujuh puluh delapan miliar seratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

Disamping peluang yang tercipta bagi dunia usaha dari pengeluaran pemerintah pusat, peluang bagi dunia usaha juga diciptakan dari daerah berupa anggaran transfer ke daerah. Dana transfer ke daerah adalah pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Lebih lanjut pengeluaran negara dalam APBN 2011 yang dianggarkan untuk keperluan anggaran transfer ke daerah Rp 392.980,3 miliar yang terdiri atas:

- a. Dana perimbangan; dan
- b. Dana otonomi khusus dan penyesuaian.

Dana perimbangan direncanakan sebesar Rp 334.324,0 miliar yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 83.558,4 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 225.532,8 miliar, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 25.232,8 miliar. Sedangkan dana otonomi khusus dan penyesuaian direncanakan sebesar Rp 58.656,3 miliar.

Sementara itu dana otonomi khusus dan penyesuaian terdiri atas:

- a. Dana otonomi khusus; dan
- b. Dana penyesuaian, yang terdiri atas:
 1. dana tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD);
 2. dana insentif daerah (DID);
 3. tunjangan profesi guru (TPG);
 4. bantuan operasional sekolah (BOS);
 5. dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID); dan
 6. kurang bayar dana sarana dan prasarana infrastruktur Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008.

Dana otonomi khusus direncanakan sebesar Rp10.421,3 milyar. Sedangkan dana penyesuaian direncanakan sebesar Rp 48.235,0 milyar.

Dengan demikian peluang bagi dunia usaha yang tercipta dari daerah melalui APBN 2011 juga cukup besar. Hal ini terlihat bahwa besarnya anggaran transfer ke daerah mencapai sebesar Rp 392.980,3 miliar.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

APBN 2011 bersifat ekspansif dengan defisit sebesar Rp 124.656,5 miliar. Dari sisi penerimaan negara dan hibah, pemerintah tidak akan memberati dunia usaha dengan pengenaan pajak baru. APBN 2011 yang difisit membuka peluang bagi dunia usaha sangat besar dengan adanya 11 sektor yang memperoleh alokasi dana di atas Rp 10 triliun serta terdapat 26 sektor yang memperoleh alokasi dana di atas Rp 1 triliun walaupun kurang dari Rp 10 triliun. Peluang usaha juga terbuka di daerah dengan ditandai dengan besarnya pengeluaran pemerintah untuk transfer ke daerah. Besarnya pengeluaran transfer untuk daerah adalah sebesar Rp 392.980,3 miliar.

DAFTAR RUJUKAN

Blanchard, O. (2009), *Macroeconomics*, 5th ed. Pearson Education, New Jersey

Badan Pusat Statistik (2011), *Statistik Indonesia 2010*, Badan Pusat Statistik, Jakarta

Bank Indonesia (2011), *Laporan Perekonomian Indonesia 2010*, Bank Indonesia, Jakarta



- Dornbusch,R., Fischer, S., Startz, R. (2004), *Macroeconomics*, 9th ed. McGraw Hill, New York
- Gwartney, J.D., Stroup, R.L., Sobel, R.S. (2000), *Economics: Private and Public Choice*, 9th ed. The Dryden Press, Orlando
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2010), *Kaleidoskop Migas 2010: Produksi Terlampaui Target, Konsumsi Melebihi Kuota*
- Kementerian Keuangan (2010), *POKOK-POKOK NOTA KEUANGAN DAN RAPBN 2011 Paparan Menteri Keuangan Pada Konferensi Pers*
- (2010), *Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011*
- Pidato Presiden (2010), *Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2011 Beserta Nota Keuangannya.*
- Undang-undang Nomor 10 tahun 2010 tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011*

